



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Dr. Said Sudrajad, S.Sos., M.Si.**

Jabatan : **Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. Ansar Ahmad, S.E., M.M.**

Jabatan : **Gubernur Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,

Gubernur Kepulauan Riau

H. Ansar Ahmad, S.E., M.M.

Pihak Pertama,

**Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kepulauan Riau**



**Dr. Said Sudrajad, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196905042000031008**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta meningkatkan kapasitas nelayan terkait teknologi kelautan dan perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	308.921,60
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	32.955,78
		Nilai Tukar Nelayan / NTN (%)	116,1
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan / NTPi (%)	111,76
2.	Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum (sesuai Perdirjen PRL NOMOR 281 KEPDJPR L I 2020)	4
		Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan (persen)	90
3.	Meningkatkan daya saing dan pemasaran produk hasil perikanan	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)	13.400
		Angka Konsumsi Ikan (AKI) (kg/kap/tahun)	65,36
		Nilai Ekspor Olahan hasil Perikanan	31.824.214
4.	Meningkatkan kualitas pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan keuangan pembangunan yang terpadu dan akuntabel.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB
		Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri (Persen)	100

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 36.509.007.319,62	APBD
2.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp. 378.844.664,00	APBD
3.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 249.924.392,00	APBD
4.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 3.840.982.044,00	APBD
5.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp. 4.631.587.008,67	APBD
6.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 249.924.392,00	APBD

Tanjungpinang, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,
Gubernur Kepulauan Riau

H. Ansar Ahmad, S.E., M.M.

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kepulauan Riau

Dr. Said Sudrajad, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196905042000031008



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **LA ODE M FAISAL, S.Pi., M.Ling**

Jabatan : **Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau**
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si**

Jabatan : **Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau**
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**SEKRETARIS DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**


Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690504 200003 1 008


LA ODE M FAISAL, S.Pi., M.Ling
Pembina
NIP. 19780501 200604 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan keuangan pembangunan yang terpadu dan akuntabel.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB (Nilai Sakip)
		Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri	100 (%)

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran		Keterangan
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
1.	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	301.437.348,-	APBD
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	16.372.500,-	APBD
	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	24.473.300,-	APBD
2.	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	25.699.540.654,64	APBD
3.	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.	49.457.300,-	APBD
4.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.	18.801.500,-	APBD
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	92.358.600,-	APBD

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
Sub Kegiatan	: Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp. 29.964.200,-	APBD
Sub Kegiatan	: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 701.192.630,-	APBD
5. Kegiatan	: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 83.802.240,-	APBD
6. Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 138.503.800,-	APBD
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 1.692.127.942,-	APBD
7. Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 167.152.912,-	APBD
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 305.273.000,-	APBD
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 31.140.000,-	APBD
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 199.993.200,-	APBD

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690504 200003 1 008

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU



LA ODE M FAISAL, S.Pi., M.Ling
Pembina
NIP. 19780501 200604 1 009



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **MUFRIL AKHYAR, S.Pi**

Jabatan : **Kepala Bidang Perikanan Tangkap**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si**

Jabatan : **Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP


Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690504 200003 1 008


MUFRIL AKHYAR, S. Pi
Pembina
NIP. 19730201 200502 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatkan produksi perikanan budi- daya dan perikanan tangkap serta meningkatkan kapasitas nelayan terkait teknologi kelautan perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	308.921,60 Ton
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	116,1 (%)
		Jumlah bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diserahkan	5.310 Unit
		Jumlah Nelayan Yang Mendapatkan Pembinaan Usaha Kenelayanan (Asuran- si nelayan, KUB/Pelaku usaha)	31.304 Orang
		Jumlah penerima bantuan sarana perikanan tangkap	898 Orang
		Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang diterbitkan	150 Rekomendasi
		Jumlah pelayanan terhadap kapal perikanan	300 Layanan
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	3 Unit

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		
1. Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		
Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Rp. 6.975.935.300,-	APBD
Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Rp. 6.353.343.635,41	APBD
2. Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		
Sub Kegiatan : Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan	Rp. 65.356.530,-	APBD

Ikan untuk kapal ukuran diatas 5
GT - 30 GT dan beroperasi
sampai dengan 12 mil

3. Kegiatan : Penetapan Lokasi
Pembangunan serta
Pengelolaan Pelabuhan
Perikanan Provinsi

Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Rp. 26.494.341.129,30 APBD
Pelabuhan Perikanan

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,

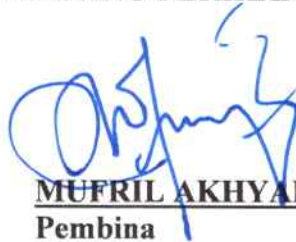
**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690504 200003 1 008

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP



MUFRIL AKHYAR, S. Pi
Pembina
NIP. 19730201 200502 1 005



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **ULIA FAHMI, S.Pi, M.Si**

Jabatan : **Kepala Bidang Perikanan Budidaya**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si**

Jabatan : **Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**


Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690504 200003 1 008

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA


ULIA FAHMI, S.Pi, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19740713 200904 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta meningkatkan kapasitas nelayan terkait teknologi kelautan dan perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	32.955,78 Ton
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	111,76 (%)
		Jumlah Pembudidaya yang terfasilitasi sarana prasarana Perikanan Budidaya	120 Orang
		Jumlah Luasan pemanfaatan lahan perikanan budidaya	30 Ha (Hektare)
		Jumlah Bantuan Sarana dan Prasarana Perbenihan, Pembesaran dan unit usaha baru perikanan budidaya yang tersedia	12 Unit

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
I. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya			
1. Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut			
Sub Kegiatan :	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.088.900,-	APBD
Sub Kegiatan :	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Rp. 750.007.112,-	APBD
Sub Kegiatan :	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Rp. 1.266.746.392,-	APBD
Sub Kegiatan :	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp. 751.251.420,-	APBD
Sub Kegiatan :	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.894.100,-	APBD


Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA


Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690504 200003 1 008


ULIA FAHMI, S.Pi, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19740713 200904 1 003



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **R. TAUFIK ZULFIKAR, S.Pi., M. H**
Jabatan : **Kepala Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si**
Jabatan : **Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690504 200003 1 008

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG KELAUTAN,
KONSERVASI DAN PENGAWASAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

R. TAUFIK ZULFIKAR, S.Pi., M. H
Pembina Tk.II
NIP. 19700224 200502 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG KELAUTAN, KONSERVASI DAN PENGAWASAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum (sesuai Perdirjen PRL NOMOR 281 KEP-DJPRL I 2020)	4 Kawasan
		Jumlah dokumen peraturan pengelolaan pemanfaatan ruang laut	1 Dokumen
		Luas kawasan konservasi daerah yang dikelola minimum	575.514,88 (Ha) Hektare
		Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan	90 (%) Persentase
		Jumlah laporan hasil pengawasan pelaku usaha yang diawasi kepatuhannya	3 Dokumen

	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil		
1.	Kegiatan : Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Rp. 378.844.664,-	APBD
II.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan		
2.	Kegiatan : Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		
	Sub Kegiatan : Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Rp. 405.498.048,-	APBD

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Sub Kegiatan : Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Rp. 3.160.039.500,-	APBD

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,

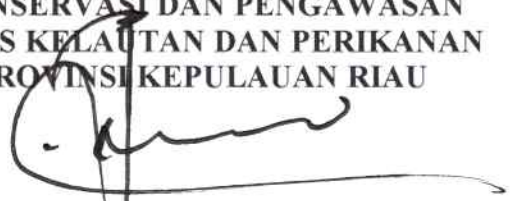
**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690504 200003 1 008

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG KELAUTAN,
KONSERVASI DAN PENGAWASAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



R. TAUFIK ZULFIKAR, S.Pi., M.H
Pembina TNI
NIP. 19700224 200502 1 002



**PERJANJIAN
KINERJATAHUN
2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Ir. ADE OVITA**

Jabatan : **Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau**
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si**

Jabatan : **Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau**
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690504 200003 1 008

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN**

Ir. ADE OVITA
Pembina
NIP. 19681019 199803 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan daya saing dan pemasaran produk hasil perikanan	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan	13.400 Ton
		Angka Konsumsi Ikan (AKI)	65,36 kg/kap/tahun
		Nilai Ekspor Olahan hasil Perikanan	31.824.214 USD
		Jumlah Unit Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang mendapatkan Surat Keterangan Berusaha	25 Unit Pengolah Ikan
		Jumlah rekomendasi GMP yang diterbitkan bagi Unit Pegolah Ikan	45 Rekomendasi
		Jumlah fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar	2 Event/kegiatan
		Jumlah unit usaha pengolahan ikan (UPI) yang diuji kelayakan mutu produk	45 Unit Usaha

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan			
1. Kegiatan :	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		
Sub Kegiatan :	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Rp. 135.875.410,-	APBD
2. Kegiatan :	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan :	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	Rp. 114.048.982,-	APBD

3. **Kegiatan :** **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Rp. 1.418.194.200,- APBD

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690504 200003 1 008

Pihak Pertama

**KEPALA BIDANG
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN**

Ir. ADE OVITA
Pembina
NIP. 19681019 199803 2 002



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : AMRIANSYAH AMIR, S.Pi

Jabatan : Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690504 200003 1 008

Pihak Pertama,

**KEPALA CABANG DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN ANAMBAS**

AMRIANSYAH AMIR, S.Pi
Pembina
NIP. 19840520 200803 1 001


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan keuangan pembangunan yang terpadu dan akuntabel.	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri	100 (%) Persentase

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			
1. Kegiatan :	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan :	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 12.480.000,-	APBD
Sub Kegiatan :	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 217.548.456,-	APBD
2. Kegiatan :	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan :	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 50.000.000,-	APBD

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU


Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690504 200003 1 008

Pihak Pertama,
KEPALA CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS


AMRIANSYAH AMIR, S.Pi
Pembina
NIP. 19840520 200803 1 001



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **ERZAMI MUHARDI, S.Pi**

Jabatan : **Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si**

Jabatan : **Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690504 200003 1 008

Pihak Pertama,

**KEPALA CABANG DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN NATUNA**

ERZAMI MUHARDI, S.Pi
Pembina
NIP. 19720302 200003 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan keuangan pembangunan yang terpadu dan akuntabel.	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri	100 (%) Persentase
2.	Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	1 Pelaku Usaha

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
1. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 5.246.000,-	APBD
2. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 25.969.160,-	APBD
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 564.206.359,-	APBD
II. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan		
3. Kegiatan : Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		
Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Rp. 35.357.000,-	APBD

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU


Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690504 200003 1 008

Pihak Pertama,
KEPALA CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA


ERZAMI MUHARDI, S.Pi
Pembina
NIP. 19720302 200003 1 009



PERJANJIAN KERJA

TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : **NASKARWANDI, ST**

Jabatan : **Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si**

Jabatan : **Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**


Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690504 200003 1 008

Pihak Pertama,

**KEPALA CABANG DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN LINGGA**


NASKARWANDI ST
Penata Tk.I
NIP. 19780624 201001 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU


NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan keuangan pembangunan yang terpadu dan akuntabel	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri	100%
2.	Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	6 Pelaku Usaha

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
1.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 32.178.000,-	APBD
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 463.097.636,-	APBD
II.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan		
2.	Kegiatan : Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		
	Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Rp. 20.068.360,-	APBD

Tanjungpinang, Januari 2025


Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU


Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690504 200003 1 008

Pihak Pertama,

KEPALA CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA


NASKARWANDI ST
Penata Tk.I
NIP. 19780624 201001 1 008



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **FAIZAL, S.E.**

Jabatan : **Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si**

Jabatan : **Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196905042000031008

Pihak Pertama,

**KEPALA CABANG DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN KARIMUN**

FAIZAL, S.E.
Pembina
NIP 197506092002121008


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN
RIAU

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan keuangan pembangunan yang terpadu dan akuntabel	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri	100%
2.	Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	6 Pelaku Usaha

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			
1. Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 7.947.480,-	APBD
2. Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 61.216.668,-	APBD
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 882.925.440,-	APBD
II. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan			
3. Kegiatan	: Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		
Sub Kegiatan	: Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Rp. 213.132.460,-	APBD

Pihak Kedua,


KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU


Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196905042000031008

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Pertama,

KEPALA CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN


FAIZAL, S.E.
Pembina
NIP 197506092002121008



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **SYAHRUL AMRI, S.T**

Jabatan : **Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si**

Jabatan : **Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690504 200003 1 008

Pihak Pertama,

**KEPALA CABANG DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN BATAM**

SYAHRUL AMRI, S.T
Penata Tk. I
NIP. 19750118 201310 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan keuangan pembangunan yang terpadu dan akuntabel	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri	100%
	Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	50 Orang
2.	Meningkatkan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta meningkatkan kapasitas nelayan terkait teknologi kelautan perikanan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	50 Rekomendasi
3.	Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha
		Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	11 Kelompok Masyarakat

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
1.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 6.189.320 ,-	APBD
2.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 65.135.000 ,-	APBD
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 415.479.561 ,-	APBD
II.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil		
3.	Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
	Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp. 299.314.693 ,-	APBD


	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
III.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		
4.	Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
	Sub Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp. 76.494.120,-	APBD
IV.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan		
5.	Kegiatan : Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		
	Sub Kegiatan : Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Rp. 490.924.909,97,-	APBD
	Sub Kegiatan : Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Rp. 7.252.037,7,-	APBD

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU


Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690504 200003 1 008

Pihak Pertama,
KEPALA CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM


SYAHRUL AMRI, S.T
Penata Tk. I
NIP. 19750118 201310 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **ENDANG PURNAMA SARI, S.Pi, M.Si**

Jabatan : **Kepala UPTD Balai Benih Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si**

Jabatan : **Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690504 200003 1 008

Pihak Pertama,

**KEPALA UPTD BALAI BENIH IKAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

ENDANG PURNAMA SARI, S.Pi, M.Si
Pembina
NIP. 19820509 200904 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA UPTD BALAI BENIH IKAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan keuangan pembangunan yang terpadu dan akuntabel.	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri	100 (%) Persentase
2.	Meningkatkan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta meningkatkan kapasitas nelayan terkait teknologi kelautan dan perikanan	Jumlah ketersediaan benih bermutu di UPTD BBI	400/130 ribu Ekor
		Jumlah ketersediaan induk unggul di UPTD BBI	100 Ekor


	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 176.320.000,-	APBD
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 1.016.134.282,-	APBD
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 35.582.500,-	APBD

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
II. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		
Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		
Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Rp. 977.500.000,-	APBD

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690504 200003 1 008

Pihak Pertama,

KEPALA UPTD BALAI BENIH IKAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU



ENDANG PURNAMA SARI, S.Pi, M.Si
 Pembina
 NIP. 19820509 200904 2 001



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **SITTI ROHAIDA, S.Pi**

Jabatan : **Plt. Kepala BPMP2KP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si**

Jabatan : **Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690504 200003 1 008

Pihak Pertama,

Plt. KEPALA BPMP2KP

SITTI ROHAIDA, S.Pi
Penata Tk. I
NIP. 197208272005022001


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BPMP2KP
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan keuangan pembangunan yang terpadu dan akuntabel.	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri	100 (%) Persentase

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			
1. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 27.369.996,98	APBD
2. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 83.300.000,-	APBD
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 519.733.841,-	APBD
3. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang			
Sub Kegiatan	: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 12.502.300,-	APBD
4. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 20.043.700,-	APBD

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU


Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690504 200003 1 008

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA BPMP2KP


SITTI ROHAIDA, S.Pi
Penata Tk. I
NIP. 197208272005022001



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **AHMAD SYUKRI, S.T.**

Jabatan : **Kepala UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si**

Jabatan : **Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690504 200003 1 008

Pihak Pertama,

**KEPALA UPTD BALAI PELABUHAN
PERIKANAN PANTAI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

AHMAD SYUKRI, S.T.
Penata Tk.I
NIP. 19820205 201001 1 023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan kualitas pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan keuangan pembangunan yang terpadu dan akuntabel.	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri	100 (%) Persentase
2.	Meningkatkan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta meningkatkan kapasitas nelayan terkait teknologi kelautan perikanan	Jumlah pelayanan terhadap kapal perikanan	300 Layanan

	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
1.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 11.307.000,-	APBD
2.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 348.000.000,-	APBD
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 466.552.293,-	APBD
3.	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 12.757.000,-	APBD
II.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		
4.	Kegiatan : Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Rp. 73.826.400,-	APBD

Tanjungpinang, Januari 2025

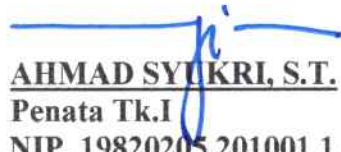
Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU


Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690504 200003 1 008

Pihak Pertama,

KEPALA UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI


AHMAD SYUKRI, S.T.
Penata Tk.I
NIP. 19820205 201001 1 023